

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi, R. (2004). *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddiqie, J. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Pers.

Dina, S. (2019). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Jember: CV PUSTAKA ABADI.

Efendi, J., Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: KENCANA.

Hamidi, J., Lutfi, M. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Alumni.

[Type here]

Helmizar., et al. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Madhakomala R, M., Gunawan, K. (2020). *Model Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja (Studi Kasus di Staf Logistik TNI)*. Bengkulu: Penerbit El Markazi.

Nurjamal, E. (2020). *Buku Ajar Hukum Tata Negara Indonesia*. Tasikmalaya: EDU PUBLISHER.

Raja Damaitu, E., et al. (2024). *Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.

Rohayatin, T. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.

Sam Widodo, I., et al. (2023). *Hukum Tata Negara*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

[Type here]

Setiawan, I., Widowati, A., Johannes. (2024). *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*. Kabupaten Bandung: Rtujuh Media Printing.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soeria Atmadja, A. 2009. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.

Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian, Pendidikan, Kompetensi, dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Akasara.

Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

YLBHI. (2007). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI

[Type here]

JURNAL

Anangkota, M. Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2). hal. 149.

Apriandani, B., Sumantri., Sofian. 2025. Urgensi DPR RI Dalam Fungsi Pengawasan Anggaran di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, VIII(2). hal. 16.

Asmara, G., Risnain, M., Zunnuraeni., Karyati, S. 2019 Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2). hal 196.

Basniwati, AD. 2017. Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Hukum JATISWARA*. hal 128.

Dwi Muradi, A. 2017. Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, 3(1). hal 1.

[Type here]

Fatima Hoar Bere, M. t.d. Pengelolaan Anggaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. *Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar*. hal 17.

Febri Herviana, N., et al. 2024. Prinsip *Checks and Balances* Terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(11). hal 169.

Gede Sujana, I. 2024. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1). hal 8.

Idrus L. 2019. Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2). hal 922.

Juliyanti, I., Zakaria, A., Khairunnisa, H. 2025. Peran Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*, 6(2). hal 377.

Julpikar. 2016. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia. *De Lega Lata*, 1(1). hal 164.

Prama Jasa, G., Herawati, R. 2017. Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. *Jurnal Law Reform*, 13(2). hal 196.

Rifqi Aziz, M. 2023. Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk *Checks and Balances* Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 3(2). hal 152.

Ryadi, A., Pratolo, S. 2007. Pengetahuan Anggaran dan Efektivitas Partisipasi Dalam Hubungannya dengan Kepuasan atas Pelaksanaan Anggaran Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 8(2). hal 128.

Saharuddin, Bau Mallarangeng, A., Aziz, A. 2023. *Evaluation of the Effectiveness of the Parliamentary Supervision Mechanism on Executive Performance in the Indonesian Constitutional Legal System. LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, and Humaniora*, 2(3). hal 235.

[Type here]

Setiawan, A., Melia Sari, S., Rahmah, N. 2025. Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan Legislatif. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(6). hal 3.

Sunarto. 2016. Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2). hal 158.

Suripatty, G., Salmon, H., Mustamu, J. 2023. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi di Daerah. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 3(2). hal 184.

Syakiro Hertan, M. F. A., et al. 2024. Peran dan Fungsi DPR RI Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif. *Jurnal Pengabdian Jejamo*. hal 39.

Umarella, B. 2019. Analisis Anggaran Sebagai Upaya Dalam Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek Pada PT X di Kota Ambon. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, 01(02). hal 71.

[Type here]

Wahyudin, F., Aryani Purwana, R., Masrihah, S. 2019. Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2). hal 14.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

[Type here]

SUMBER LAIN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2021. *Ringkasan Laporan DPR RI Tahun Sidang 2020 - 2021 14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021*. Tahun 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Mohamad Said, M. 2024. *Laporan Badan Anggaran DPR RI Mengenai Hasil pembicaraan TK.I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*. Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 September 2024.

Nugraha, S. 2013. *Peran Parlemen Dalam Transparansi Anggaran*. Disampaikan Dalam AIPA Workshop on Parliamentary Budgeting/Transparency. Jakarta. 9-12 September 2013.

Nugraha, S. 2020. *Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkup DPR RI*. Juli 2020.

[Type here]

INTERNET

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. t.d. *Pemeriksaan*

dan

Pertanggungjawaban.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-pusat/akuntansi-dan-pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn/1680-pemeriksaan-dan-pertanggungjawaban.html>.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2023,

29 Agustus). *Rapat Kerja dengan DPR, Menteri Keuangan Paparkan*

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022.

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/08/29/4450-rapat-kerja-dengan-dpr-menteri-keuangan-paparkan-pertanggungjawaban-atas-pelaksanaan-apbn-2022>.

Hukumonline. (2024, 22 Juli). *Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan*

Pengawasan DPR. [https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-](https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/)

[fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/](https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/).